

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian tentang implementasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* melalui Banyuwangi Tanggap *Stunting* di Kecamatan Cluring, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Sudah dikatakan cukup baik dan mempunyai tujuan yang jelas, Misalnya Standar dari kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati dimana target prevalensi penurunan *stunting* paling rendah 1% setiap tahun, kemudian sasaran yang dimaksud ialah sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu hamil menyusui di bawah usia 6 bulan, ibu menyusui dan anak suai 6 sampai 24 bulan, dan anak usia 0-23 bulan dan balita dan anak balita usia 24-59 bulan.

##### **2. Sumber daya**

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cluring dalam pelaksanaannya dikatakan sudah baik namun masih ada kendala yang ditemui untuk pemberian dana insentif kepada Kader BTS, dibuktikan OPD dan pihak lainnya telah melakukan sinergi dalam menjalankan kebijakan BTS yang diciptakan oleh Bupati Banyuwangi untuk mewujudkan Banyuwangi *Zero Stunting*. Kegiatan perencanaan, *monitoring*, serta evaluasi dilakukan secara bersama-sama mulai dari Kecamatan Cluring, OPD, puskesmas, kader desa, Desa. Selain itu dari penyediaan fasilitas kesehatan dan

jumlah kader posyandu dan BTS sudah banyak. Kecamatan Cluring memiliki 2 Puskesmas dan 87 posyandu serta 435 kader posyandu dan 9 kader BTS. Dari segi finansial Kecamatan Cluring mempunyai alokasi anggaran yang besar untuk Ibu hamil Resti dan baduta stunting hal itu membuktikan bahwa finansial yang dimiliki untuk mendukung kebijakan program.

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Setiap pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. OPD menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang tertera pada Keputusan Camat Cluring Nomor: 188/10/KEP/429.512/2002 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Cluring. Hal tersebut menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan.

### **4. Komunikasi**

Penerapan untuk komunikasi antar organisasi/OPD telah berjalan dengan baik. OPD berkoordinasi baik secara formal maupun informal melalui pertemuan FGD di Mini Loka Karya selain itu selalu berkomunikasi melalui grup WA guna menyampaikan hasil diskusi ke masyarakat.

### **5. Sikap para pelaksana**

OPD menerima bentuk kebijakan dengan respon yang positif namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa yang belum menjalankan tugas dengan baik menandakan bahwa masih ada beberapa yang menganggap sepele tugas tersebut.

## **6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik**

Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Cluring belum berjalan dengan baik. Meskipun mereka terbantu dengan kebijakan yang mereka dapat PMT hal tersebut meringankan beban bagi mereka, serta UMKM di lingkungan sekitar berjalan dengan baik dengan adanya program dari ASN belanja cantik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian UMKM serta bentuk dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan alokasi anggaran yang besar untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Cluring. Namun, kesadaran terhadap makanan yang bergizi masih kurang untuk diberikan kepada anak, tingkat ekonomi orang tua yang rendah serta pola asuh orang tua yang masih kurang.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Cluring perlu melakukan edukasi dan konseling lebih lanjut pentingnya stunting agar masyarakat mau mendengar dan tidak menyepelekan masalah *stunting*.
2. Pemerintah Kecamatan Cluring perlu mengevaluasi terhadap kinerja setiap lini untuk memastikan tugas dan kewajibannya dijalankan dengan optimal.
3. Pemerintah Kecamatan Cluring perlu melakukan inovasi sosialisasi dengan jangka waktu setidaknya 2 minggu sekali dan mengupayakan inovasi-inovasi baru dikarenakan respon dari masyarakat tentang stunting masih rendah, serta

pemerintah daerah melakukan monitoring keseimbangan harga produk UMKM agar daya beli masyarakat tidak menurun.